

ABSTRAK

Dalam upaya menciptakan kemudahan berusaha dan investasi, Pemerintah mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang mengubah sistem perizinan dari perizinan konvensional menjadi perizinan berbasis risiko. Regulasi ini mewajibkan setiap kegiatan usaha diklasifikasikan berdasarkan tingkat risiko usaha yang ditimbulkan. Penelitian ini mengkaji implementasi PP Nomor 28 Tahun 2025 pada pengelolaan wisata di Pantai Lon Malang, yang merupakan salah satu destinasi wisata yang dikelola oleh BUMDes Mitra Mandiri, yang dalam praktiknya ditemukan ketidaksesuaian administratif antara perizinan yang dimiliki dengan kegiatan usaha yang dijalankan, khususnya aktivitas wisata air yang tergolong risiko menengah tinggi yang tidak tercantum dalam perizinannya. Sehingga perlu diketahui Apakah perizinan usaha pariwisata pantai lon malang telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 dan Bagaimana tindakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap ketidaksesuaian perizinan kegiatan usaha pariwisata Pantai Lon Malang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan sosiologi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara administratif BUMDes Mitra Mandiri telah memiliki NIB sebagai legalitas dasar perizinan sesuai dengan Pasal 206 ayat (1) PP Nomor 28 Tahun 2025. Namun terdapat ketidaksesuaian karena tidak seluruh kegiatan usaha tercantum dalam NIB yang dimiliki, padahal aktivitas wisata air seperti *speed boat*, *banana boat*, dan perahu kano telah beroperasi dan termasuk kategori risiko menengah tinggi yang memerlukan Sertifikat Standar diverifikasi sesuai Pasal 132 ayat (1) PP Nomor 28 Tahun 2025. Selain itu, tindakan pemerintah daerah provinsi dalam melakukan pengawasan belum berjalan optimal karena adanya pembagian kewenangan antara pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi serta koordinasi yang belum efektif, sehingga pengawasan cenderung bersifat insidental dan belum diikuti penerapan sanksi administratif secara tegas.

Kata Kunci: Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pariwisata, Pengawasan.

ABSTRACT

In an effort to create ease of doing business and investment, the Government passed Government Regulation Number 28 of 2025 concerning the Implementation of Risk-Based Business Licensing which changes the licensing system from conventional licensing to risk-based licensing. This regulation requires every business activity to be classified based on the level of business risk it poses. This study examines the implementation of PP Number 28 of 2025 in tourism management at Lon Beach Malang, which is one of the tourist destinations managed by BUMDes Mitra Mandiri, which in practice found administrative discrepancies between the permits held and the business activities carried out, especially water tourism activities classified as medium to high risk which are not listed in the permits. Therefore, it is necessary to know whether the licensing of Lon Beach Malang tourism businesses is in accordance with Government Regulation Number 28 of 2025 and what actions are taken by the local government regarding

the non-compliance of licensing for Lon Beach Malang tourism business activities. This study uses an empirical legal research method with a statute approach and a legal sociology approach. The results of the study show that administratively, BUMDes Mitra Mandiri has had a NIB as the basic legality for licensing in accordance with Article 206 paragraph (1) of PP Number 28 of 2025. However, there is a discrepancy because not all business activities are listed in the NIB owned, even though water tourism activities such as speed boats, banana boats, and canoes have been operating and are included in the medium-high risk category which requires a Standard Certificate to be verified in accordance with Article 132 paragraph (1) of PP Number 28 of 2025. In addition, the actions of the provincial government in carrying out supervision have not been optimal due to the division of authority between the district government and the provincial government and coordination that has not been effective, so that supervision tends to be incidental and has not been followed by the application of strict administrative sanctions.

Keywords: Risk Based Business Licensing, Tourism, Supervision.